



Manajemen Penjaminan Mutu pada Satuan PAUD Inklusif : Studi Kasus

Najlaa Salsabila Ainahag Arifin¹, dan Ali Formen²

^{1,2} Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK. *Penjaminan mutu pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) inklusif merupakan proses yang mengintegrasikan aspek manajerial dan penyelenggaraan layanan inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen mutu PAUD inklusif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat di TK Azasa (nama lembaga samaran). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Partisipan penelitian terdiri atas satu kepala sekolah dan satu guru kelas yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria pemilihan partisipan meliputi keterlibatan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program penjaminan mutu pendidikan inklusif di TK Azasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan mutu dilaksanakan melalui adaptasi pembelajaran, integrasi aspek inklusif dalam evaluasi dan dokumentasi, serta kolaborasi antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga profesional. Faktor pendukung meliputi pelatihan guru, komitmen sekolah, modifikasi pembelajaran, dan dukungan orang tua, sedangkan hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kebutuhan peningkatan kompetensi guru. Penelitian menyimpulkan bahwa adaptasi pembelajaran, kolaborasi, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan penjaminan mutu pada satuan PAUD inklusif.*

Kata Kunci : *Manajemen Mutu; PAUD Inklusif; Penjaminan Mutu; Total Quality Management*

ABSTRACT. *Quality assurance in inclusive Early Childhood Education (ECE) is a process that integrates managerial aspects with the delivery of inclusive services. This study aims to analyze quality management in inclusive ECE covering planning, implementation, and evaluation, as well as supporting and inhibiting factors at TK Azasa (a pseudonym). The study employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and subsequently analyzed using the Miles and Huberman model. Participants consisted of one school principal and one classroom teacher, selected via purposive sampling. Selection criteria included direct involvement in the planning, implementation, monitoring, and evaluation of the inclusive education quality assurance program at TK Azasa. The results indicate that quality assurance is implemented through instructional adaptations, the integration of inclusive elements into evaluation and documentation, and collaboration among teachers, the principal, parents, and professionals. Supporting factors include teacher training, school commitment, instructional modifications, and parental support, while the primary obstacles are limited human resources and the need for enhanced teacher competence. The study concludes that instructional adaptation, collaboration, and continuous evaluation are key to successful quality assurance in inclusive ECE settings.*

Keyword : *Quality Management; Inclusive ECE; Quality Assurance; Total Quality Management.*

Copyright (c) 2026 Najlaa Salsabila Ainahag Arifin dkk.

✉ Corresponding author : Najlaa Salsabila Ainahag Arifin

Email Address : najlasalsabila@students.unnes.ac.id

Received 10 Juli 2026, Accepted 10 Agustus 2026, Published 10 Agustus 2026

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas bahwa penyelenggaraan PAUD tidak hanya terfokus pada pemberian layanan pendidikan, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh hak belajarnya dengan layanan yang berkualitas, inklusif, dan adil [1]. Pertumbuhan anak sangat cepat, sehingga diperlukan lingkungan belajar yang mampu memenuhi perbedaan sifat, bakat, serta kebutuhan setiap anak [2]. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD harus memastikan semua anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan menyediakan layanan pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman para siswanya [3]. Bentuk implementasi untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pendidikan inklusif yang memberikan akses bagi semua anak tanpa diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) [4]. Pendidikan inklusif tidak sekadar menekankan penerimaan peserta didik yang beragam, tetapi mengharuskan lembaga memiliki kesiapan dalam menyediakan lingkungan belajar, proses pembelajaran, serta sistem pengelolaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik secara adil, setara, dan bermakna [5].

Penyelenggaraan PAUD inklusif telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa [6] serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini [7]. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap satuan PAUD berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Meskipun demikian, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan inklusif di satuan PAUD masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kompetensi guru, belum memadainya sarana dan prasarana, sistem evaluasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus, serta belum optimalnya sistem penjaminan mutu yang mendukung implementasi pendidikan inklusif. Kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik penyelenggaraan di lapangan, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai penerapan manajemen mutu pada satuan PAUD inklusif [8].

Dalam dunia pendidikan, manajemen mutu dipahami sebagai suatu proses yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta perbaikan [9]. Pendekatan yang banyak digunakan adalah Total Quality Management (TQM) yang dikembangkan oleh Deming dan Juran. Pendekatan ini diadaptasi dalam bidang pendidikan sebagai strategi peningkatan mutu melalui keterlibatan seluruh pihak terkait, pengendalian proses, orientasi pada kepuasan pengguna layanan, dan budaya perbaikan berkelanjutan [10]. Berbagai penelitian telah mengkaji penerapan manajemen mutu maupun pendidikan inklusif pada satuan pendidikan anak usia dini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan *Total Quality Management (TQM)* mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui perencanaan yang sistematis, keterlibatan seluruh warga sekolah,

serta budaya perbaikan berkelanjutan [11], [12]. Sementara itu, penelitian lain menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh kompetensi guru, kepemimpinan sekolah, kolaborasi dengan orang tua, serta dukungan kebijakan dan sumber daya [13]. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas manajemen mutu dan pendidikan inklusif sebagai dua kajian yang terpisah. Penelitian mengenai bagaimana sistem penjaminan mutu diimplementasikan secara khusus pada satuan PAUD inklusif, terutama yang mengintegrasikan prinsip-prinsip TQM dengan praktik layanan inklusif, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek pembelajaran atau kompetensi guru, sedangkan kajian mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat penjaminan mutu dalam konteks PAUD inklusif belum banyak dikaji secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian empiris mengenai implementasi manajemen penjaminan mutu pada satuan PAUD inklusif.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan selama tiga minggu pada bulan Maret, TK Azasa (nama samaran) merupakan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan inklusif dengan melibatkan peserta didik reguler dan anak berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan belajar. Hasil observasi menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan berbagai upaya penjaminan mutu, antara lain melalui modifikasi pembelajaran, pelaksanaan pelatihan guru, supervisi kepala sekolah, evaluasi pembelajaran secara berkala, serta penguatan kolaborasi dengan orang tua dan tenaga profesional. Namun demikian, masih ditemukan beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedianya instrumen penjaminan mutu yang secara khusus mengakomodasi indikator layanan inklusif, serta keterbatasan sarana pendukung pembelajaran. Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa implementasi penjaminan mutu pada PAUD inklusif masih memerlukan penguatan agar mampu menjamin kualitas layanan bagi seluruh peserta didik.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi pendidikan inklusif atau manajemen mutu secara terpisah, tetapi menganalisis keterkaitan keduanya melalui perspektif *Total Quality Management (TQM)* pada satuan PAUD inklusif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai bagaimana prinsip-prinsip TQM diimplementasikan dalam sistem penjaminan mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan layanan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan model penjaminan mutu yang lebih responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik di satuan PAUD inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen penjaminan mutu pada satuan PAUD inklusif di TK Azasa. Analisis difokuskan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penjaminan mutu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis implementasi manajemen penjaminan mutu pada satuan PAUD inklusif di TK Azasa (nama samaran). Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan selama tiga minggu pada bulan Maret, diperoleh gambaran bahwa TK Azasa telah menerapkan berbagai program penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Temuan awal tersebut menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian karena lembaga memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan April–Juni 2026.

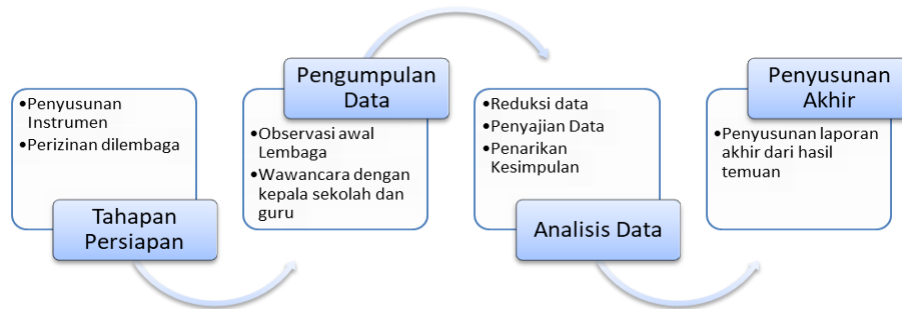
Penelitian dilakukan di TK Azasa (nama samaran), yaitu satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif bagi anak reguler dan anak berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan belajar. Lembaga ini telah menerapkan program penjaminan mutu melalui penyusunan program sekolah, supervisi pembelajaran, monitoring, dan evaluasi secara berkala sehingga dipilih sebagai lokasi penelitian.

Partisipan penelitian terdiri atas satu kepala sekolah (Eza, nama samaran) dan satu guru kelas (Rapi, nama samaran) yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria pemilihan partisipan meliputi keterlibatan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program penjaminan mutu pendidikan inklusif di TK Azasa. Jumlah partisipan tersebut dipandang memadai karena penelitian ini menggunakan desain studi kasus yang berfokus pada kedalaman informasi (*information-rich cases*) daripada banyaknya jumlah informan. Kecukupan data (*data saturation*) dicapai ketika informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan pola yang konsisten serta tidak ditemukan lagi informasi atau tema baru yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar telaah dokumen yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Pedoman wawancara memuat pertanyaan mengenai perencanaan penjaminan mutu, pelaksanaan program pendidikan inklusif, monitoring dan evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi penjaminan mutu. Observasi nonpartisipan dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pembelajaran inklusif tanpa keterlibatan peneliti dalam proses pembelajaran. Indikator observasi meliputi pelaksanaan pembelajaran inklusif, implementasi program penjaminan mutu, peran guru, interaksi guru dengan peserta didik, penggunaan sarana pendukung, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan dokumen sekolah, seperti program kerja, dokumen perencanaan, laporan evaluasi, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Sebelum digunakan, instrumen penelitian disusun berdasarkan kajian teori dan divalidasi melalui *expert judgment* oleh dosen yang memiliki kompetensi di bidang manajemen pendidikan anak usia dini dan penelitian kualitatif.

Prosedur penelitian meliputi empat tahap, yaitu: (1) penyusunan instrumen penelitian dan perizinan, (2) pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi, (3) analisis data, serta (4) penyusunan laporan penelitian. Alur penelitian disajikan pada **gambar 1. Desain Penelitian**.



Gambar 1. Desain Penelitian

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan sejak awal pengumpulan data melalui proses transkripsi hasil wawancara, pembacaan berulang terhadap data, pemberian kode (*open coding*), pengelompokan kode ke dalam kategori, dan penyusunan tema-tema penelitian yang meliputi perencanaan penjaminan mutu, pelaksanaan program inklusi, monitoring dan evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan identifikasi pola, hubungan antarkategori, serta interpretasi temuan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik dan memverifikasi kesimpulan secara berulang berdasarkan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber hingga diperoleh temuan yang kredibel.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, guru, dan dokumen sekolah, serta triangulasi teknik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan *member checking* dengan meminta partisipan meninjau kembali hasil wawancara dan interpretasi peneliti. Peneliti juga menerapkan *peer debriefing* melalui diskusi dengan dosen pembimbing untuk memperoleh masukan terhadap proses analisis data. Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk *audit trail* sehingga setiap tahapan penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

Tahapan Penelitian	Waktu
Observasi awal	Maret 2026 (3 Minggu)
Penyusunan instrumen dan perizinan	Awal April 2026
Pengumpulan data	April-Mei 2026
Analisis data	Mei-Juni 2026
Penyusunan Laporan	Juni 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh layanan inklusif terhadap penjaminan mutu. Layanan inklusif tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak belajar anak berkebutuhan khusus, tetapi menjadi bagian penting dalam sistem penjaminan mutu sekolah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan inklusif mendorong perubahan pada proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga refleksi

pembelajaran. Guru menyesuaikan metode, media, kegiatan, serta penilaian sesuai karakteristik setiap anak sehingga seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Tabel 2. Temuan pengaruh layanan inklusif terhadap penjaminan mutu

Aspek	Temuan Penelitian
Perencanaan pembelajaran	RPP dimodifikasi sesuai kebutuhan anak
Pelaksanaan pembelajaran	Menggunakan pembelajaran diferensiasi dan media visual
Hasil pembelajaran	Anak lebih aktif, percaya diri, dan mampu berinteraksi
Kompetensi guru	Meningkat melalui pelatihan dan pengalaman
Evaluasi	Digunakan sebagai refleksi untuk perbaikan layanan

Tabel 2 menunjukkan layanan inklusif memengaruhi hampir seluruh komponen penjaminan mutu pembelajaran. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada proses pembelajaran, tetapi juga pada peningkatan keterlibatan peserta didik dan kompetensi guru dalam mengelola kelas inklusif. Rapi menyampaikan, *"Layanan inklusif membuat guru harus mengubah cara mengajar, baik strategi, metode, maupun media pembelajaran. Guru harus lebih kreatif dan fleksibel agar semua anak dapat mengikuti pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing."* Eza menyatakan, *"Layanan inklusif merupakan bagian penting dari penjaminan mutu karena kami melayani semua anak tanpa membedakan kondisi mereka. Hal ini memperkuat budaya mutu sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah."*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan inklusif di TK Azasa mendorong perubahan pada seluruh proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga refleksi pembelajaran. Guru melakukan penyesuaian metode, media, kegiatan, dan asesmen sesuai karakteristik setiap peserta didik sehingga seluruh anak memperoleh kesempatan belajar yang setara [14]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan inklusif tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak belajar anak berkebutuhan khusus, tetapi telah menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu sekolah.

Temuan tersebut dapat dianalisis menggunakan perspektif *Total Quality Management (TQM)* yang menekankan bahwa peningkatan mutu merupakan proses berkelanjutan (*continuous improvement*) yang berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan (*customer focus*) serta melibatkan seluruh warga sekolah (*total involvement*). Dalam konteks PAUD inklusif, peserta didik dengan karakteristik yang beragam menjadi fokus utama layanan pendidikan. Oleh karena itu, modifikasi pembelajaran yang dilakukan guru mencerminkan implementasi prinsip *customer focus*, sedangkan evaluasi dan refleksi pembelajaran menunjukkan adanya budaya *continuous improvement* dalam meningkatkan mutu layanan.

Dari perspektif pendidikan inklusif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran tidak lagi diukur hanya dari capaian akademik, tetapi juga dari kemampuan sekolah mengakomodasi keberagaman kebutuhan peserta didik, meningkatkan partisipasi belajar, serta mengembangkan aspek sosial-emosional dan kemandirian anak. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma penjaminan mutu dari pendekatan yang berorientasi pada standar hasil menuju pendekatan yang berorientasi pada kualitas proses pembelajaran yang inklusif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembelajaran inklusif menuntut penyesuaian metode, media, dan asesmen agar setiap peserta didik dapat berpartisipasi secara optimal [1]. Lingkungan belajar yang menghargai keberagaman juga terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memperkuat budaya sekolah yang inklusif [15]. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan terdahulu bahwa layanan inklusif berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran, sekaligus menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip TQM dapat memperkuat implementasi pendidikan inklusif di satuan PAUD.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkaya penerapan konsep *Total Quality Management (TQM)* dalam konteks PAUD inklusif dengan menegaskan bahwa mutu pendidikan tidak hanya diukur dari efektivitas proses pembelajaran, tetapi juga dari kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan belajar seluruh peserta didik secara adil dan tanpa diskriminasi. Secara praktis, hasil penelitian mengindikasikan perlunya sekolah mengintegrasikan indikator layanan inklusif ke dalam sistem penjaminan mutu melalui penerapan pembelajaran yang adaptif, pelaksanaan asesmen yang fleksibel, serta pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Implementasi sistem penjaminan mutu inklusif. Sistem penjaminan mutu layanan inklusif telah dilaksanakan melalui evaluasi pembelajaran, supervisi kepala sekolah, koordinasi antar guru, dokumentasi perkembangan anak, serta komunikasi yang berkelanjutan dengan orang tua. Penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil belajar anak, tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran, perkembangan sosial-emosional, keterlibatan peserta didik, dan efektivitas layanan yang diberikan. Sekolah juga mulai mengintegrasikan aspek-aspek inklusif ke dalam proses evaluasi sehingga sistem penjaminan mutu mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik peserta didik.

Tabel 3. temuan pengaruh layanan inklusif terhadap penjaminan mutu

Aspek	Temuan Penelitian
Evaluasi pembelajaran	Dilaksanakan secara berkala sebagai dasar refleksi dan perbaikan
Supervisi	Kepala sekolah melakukan supervisi terhadap pembelajaran inklusif
Dokumentasi	Menggunakan catatan perkembangan, observasi, dan portofolio
Kolaborasi	Guru, kepala sekolah, orang tua, dan psikolog bekerja sama
Budaya mutu	Mengembangkan refleksi dan perbaikan berkelanjutan

Tabel 3 menunjukkan implementasi penjaminan mutu di TK Azasa telah mengakomodasi prinsip-prinsip layanan inklusif melalui proses evaluasi, supervisi, dokumentasi, serta kolaborasi yang melibatkan banyak pihak terkait [16]. Penjaminan mutu tidak hanya diarahkan untuk standar administrasi sekolah, tetapi sebagai upaya memastikan bahwa seluruh peserta didik memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Rapi menyampaikan, *"Penjaminan mutu di TK Azasa sudah mulai berjalan secara sistematis melalui evaluasi pembelajaran, koordinasi antar guru, komunikasi dengan orang tua, dan pelatihan guru. Namun, masih diperlukan pengembangan sarana dan sistem evaluasi yang lebih terstruktur agar layanan inklusif dapat berjalan lebih optimal."* Eza menjelaskan, *"Penjaminan mutu di TK Azasa sudah mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi. Kami juga menggunakan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act) sebagai dasar perbaikan sehingga hasil evaluasi menjadi acuan dalam meningkatkan mutu layanan."*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu di TK Azasa telah dilaksanakan melalui evaluasi pembelajaran, supervisi kepala sekolah, dokumentasi perkembangan anak, koordinasi antarguru, serta komunikasi yang berkelanjutan dengan orang tua. Penjaminan mutu tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil belajar, tetapi juga memastikan bahwa proses pembelajaran mampu memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip *continuous improvement* dalam TQM melalui siklus *Plan-Do-Check-Act (PDCA)*. Evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana perbaikan sehingga proses penjaminan mutu berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan kepala sekolah, guru, orang tua, dan tenaga profesional mencerminkan prinsip *total involvement*, yaitu peningkatan mutu merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.

Dalam perspektif pendidikan inklusif, kolaborasi multipihak merupakan komponen penting untuk menjamin keberlangsungan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Penjaminan mutu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai proses reflektif untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang adil, setara, dan bermakna. Temuan penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan merupakan dasar pengambilan keputusan dalam penjaminan mutu pendidikan inklusif. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan tenaga profesional menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif[17], sedangkan budaya refleksi dan perbaikan berkelanjutan mampu memperkuat sistem penjaminan mutu sekolah[18].

Secara teoritis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan *Total Quality Management (TQM)* pada PAUD inklusif tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar administratif, tetapi juga pada penguatan budaya refleksi, kolaborasi, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada data. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah perlu menyusun instrumen penjaminan mutu yang secara spesifik memuat indikator layanan inklusif agar proses evaluasi dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kualitas layanan pendidikan.

Faktor pendukung dan penghambat penjaminan mutu inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru, komitmen kepala sekolah, dukungan orang tua, serta modifikasi pembelajaran menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan penjaminan mutu layanan inklusif. Sebaliknya, keterbatasan jumlah guru, tingginya beban kerja, belum optimalnya sarana pendukung, serta perlunya penyempurnaan instrumen penjaminan mutu masih menjadi tantangan dalam implementasinya. Dalam perspektif TQM, peningkatan mutu dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, pengembangan kompetensi, kepemimpinan, dan budaya organisasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas berpotensi menghambat proses peningkatan mutu karena sekolah belum mampu memberikan pendampingan yang optimal kepada seluruh peserta didik berkebutuhan khusus.

Tabel 4. Temuan implementasi sistem penjaminan mutu inklusif

Aspek	Temuan Penelitian
Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru	Keterbatasan SDM
Modifikasi pembelajaran	Beban kerja guru
Pengelolaan kelas yang fleksibel	Instrumen mutu belum spesifik
Dukungan orang tua	Kebutuhan peningkatan sarana
Komitmen kepala sekolah	Pendampingan guru masih perlu ditingkatkan

Tabel 4 menunjukkan keberhasilan penjaminan mutu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran inklusif, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, sumber daya, serta kerja sama seluruh pihak terkait. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya menjadi faktor yang perlu diperkuat agar layanan inklusif dapat berjalan secara optimal. Guru kelas menyampaikan, *"Modifikasi pembelajaran dan pengelolaan kelas menjadi faktor utama yang mendukung penjaminan mutu karena semua anak dapat mengikuti pembelajaran sesuai kemampuannya. Namun, tantangan terbesar adalah beban kerja dan kebutuhan peningkatan kompetensi guru dalam mengelola kelas inklusif."* Kepala sekolah juga mengungkapkan, *"Pelatihan guru, workshop, dan kolaborasi menjadi faktor yang paling mendukung penjaminan mutu. Akan tetapi, sekolah masih membutuhkan dukungan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas agar layanan inklusif dapat berkembang lebih optimal."*

Temuan-temuan ini memperkuat studi terdahulu yang mengatakan bahwa kualitas layanan inklusif dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan komitmen sekolah dalam melakukan peningkatan mutu berkelanjutan. Pelatihan yang diikuti guru memberikan pengetahuan tambahan mengenai pembelajaran inklusif sehingga dapat meningkatkan kompetensi dalam melayani peserta didik yang beragam. Pelatihan guru, modifikasi pembelajaran, serta dukungan sekolah merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan inklusif [19]. Workshop, evaluasi berkala, dan kerja sama dengan orang tua maupun tenaga profesional merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan mutu layanan [5].

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah guru, tingginya beban kerja, serta belum optimalnya sarana pendukung menyebabkan pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus belum dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh kompetensi pendidik dan dukungan sumber daya yang tersedia. Temuan ini sejalan dengan penelitian [20] yang menyatakan bahwa masih terbatasnya guru yang memiliki kompetensi pendidikan khusus menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitas guru dalam memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, temuan ini juga didukung oleh [21] yang menjelaskan bahwa implementasi penjaminan mutu pendidikan anak usia dini memerlukan dukungan sistem mutu yang terstruktur, pengembangan kapasitas guru, serta keterlibatan pimpinan lembaga agar standar mutu dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Dengan demikian, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan yang berkelanjutan serta penguatan sistem penjaminan mutu menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi manajemen penjaminan mutu pada PAUD inklusif tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar administratif, tetapi juga diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, supervisi, dokumentasi, serta kolaborasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan tenaga profesional. Penerapan layanan inklusif mendorong penyesuaian strategi pembelajaran, media, kegiatan, dan asesmen sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan setiap peserta didik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran, partisipasi peserta didik, dan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran yang inklusif. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa bukti empiris mengenai implementasi sistem penjaminan mutu pada satuan PAUD inklusif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *Total Quality Management (TQM)* dengan praktik pendidikan inklusif. Kebaruan penelitian terletak pada temuan bahwa penjaminan mutu di PAUD inklusif tidak hanya diarahkan pada pemenuhan standar mutu pendidikan, tetapi juga pada penguatan layanan yang adaptif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik, penerapan budaya perbaikan berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu sekolah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi penjaminan mutu dipengaruhi oleh kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, dukungan orang tua, serta pengelolaan pembelajaran yang adaptif. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja guru, dan belum memadainya sarana pendukung masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan layanan inklusif. Berdasarkan temuan tersebut, pengelola PAUD inklusif perlu mengoptimalkan program pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan, menyusun instrumen penjaminan mutu yang mengakomodasi indikator layanan inklusif, memperkuat kolaborasi dengan orang tua dan tenaga profesional, serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana agar sistem penjaminan mutu mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berkelanjutan dan berkualitas.

PENGHARGAAN

Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini, terutama kepala sekolah dan guru kelas TK A di TK Azasa yang telah berkenan menjadi partisipan serta memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran penelitian.

REFERENSI

- [1] A. D. Nurcahyanti, D. F. Kusuma, A. I. Cahyaningtyas, D. L. Sari, dan S. Sakulpimolrat, "Analisis Strategi Pengembangan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD Islam Makarima Kartasura," *J. Raudhah*, vol. 12, no. 2, hal. 124, Okt 2024, doi: 10.30829/raudhah.v12i2.3581.
- [2] F. N. Rahmi dan S. Wijayanti, "Upaya Peningkatan Kemampuan Guru dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

- (PAUD)," *J. Abdi Masy. Indones.*, vol. 6, no. 1, hal. 67–79, Mar 2024, doi: 10.25105/jamin.v6i1.18848.
- [3] H. J. Asdhar dan N. H. Yoenanto, "Pemerataan Akses Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini di Indonesia: A Scoping Review," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 9, no. 3, hal. 779–788, Apr 2025, doi: 10.31004/obsesi.v9i3.6450.
 - [4] S. E. Yunitasari, D. Farista, D. I. Palupi, E. Yusnita, dan S. Rohmah, "Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Pada Satuan Paud," *J. Pendidik. Indones.*, vol. 3, no. 12, hal. 1063–1071, Des 2022, doi: 10.36418/japendi.v3i12.1397.
 - [5] H. Sukmana dan D. Mulyanti, "Manajemen Mutu Pendidikan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini," *J. EBI*, vol. 5, no. 1, hal. 16–20, Mei 2023, doi: 10.52061/ebi.v5i1.104.
 - [6] J. Jamaluddin, M. J. Nur, S. P. Juliana, dan M. Urva, "Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam," *J. Al-Qalam J. Kaji. Islam Pendidik.*, vol. 14, no. 2, hal. 1–12, Des 2022, doi: 10.47435/al-qalam.v14i2.1207.
 - [7] N. Mustiani, M. MY., dan N. Hayat, "Kegiatan Bermain Plastisin dalam Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini," *J. Educ. Res.*, vol. 2, no. 1, hal. 31–42, Jul 2023, doi: 10.56436/jer.v2i1.200.
 - [8] D. E. Lomaris, "Evaluasi Pendidikan Inklusif pada PAUD: Mengungkap Kesenjangan Implementasi melalui Pendekatan CIPP," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 10, no. 2, hal. 1518–1529, Mei 2026, doi: 10.31004/obsesi.v10i2.8293.
 - [9] D. D. Septyaningrum, N. F. Zulfa, H. Hasanah, dan M. Mu'alimin, "Manajemen Mutu Pendidikan: Kajian Sistematis tentang Implementasi dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Sekolah di Indonesia," *CENDEKIA J. Ilmu Sos. Bhs. dan Pendidik.*, vol. 5, no. 4, hal. 01–09, Des 2025, doi: 10.55606/cendekia.v5i4.7107.
 - [10] T. A. Van Nguyen, D. Tucek, dan N. T. Pham, "Indicators for TQM 4.0 model: Delphi Method and Analytic Hierarchy Process (AHP) analysis," *Total Qual. Manag. Bus. Excell.*, vol. 34, no. 1–2, hal. 220–234, Jan 2023, doi: 10.1080/14783363.2022.2039062.
 - [11] K. Asrori, S. Aimah, dan I. Khauldi, "Implementasi TQM (Total Quality Management) di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini," *Murhum J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 5, no. 2, hal. 1335–1348, 2024, doi: 10.37985/murhum.v5i2.828.
 - [12] D. Desmawati, S. Subandi, D. Makbuloh, dan A. Fauzan, "Evaluasi Total Quality Management Perspektif Deming, Juran, dan Crosby dalam Pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat," *SAKALIMA Pilar Pemberdaya. Masy. Pendidik.*, vol. 3, no. 1, hal. 101–117, Mar 2026, doi: 10.70211/sakalima.v3i1.510.
 - [13] A. S. Hatami, "Manajemen Mutu Berkelanjutan Berbasis Total Quality Management (TQM) sebagai Strategi Penguatan Identitas Kelembagaan dan Kepercayaan Publik pada Lembaga Pendidikan Inklusif," *Proceeding Fak. Ilmu Pendidik. Univ. Negeri Jakarta*, vol. 3, no. 1, hal. 186–191, 2025, [Daring]. Tersedia pada: <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/semnas-ps/article/view/63430>
 - [14] A. S. Haugset dan H. Finne, "Governing early childhood education and care quality development among diverse private ECEC providers in Norway," *Educ. Inq.*, vol. 15, no. 1, hal. 85–103, Jan 2024, doi: 10.1080/20004508.2023.2280291.
 - [15] Y. Luo dan H. Li, "An evidence-based inclusive pedagogical approach in action and its insights for enhancing the professional competence of inclusive education teachers in China," *Int. J. Chinese Educ.*, vol. 13, no. 1, hal. 1–14, Jan 2024, doi: 10.1177/2212585X241242529.
 - [16] I. Ballaschk, S. Brauckmann-Sajkiewicz, dan P. Pashiardis, "Quality improvement through team development: the role of headteachers in Early Childhood Education

- settings in Germany,” *Educ. 3-13*, vol. 54, no. 6, hal. 1412–1425, Agu 2026, doi: 10.1080/03004279.2024.2409927.
- [17] M. Boa, S. K. F. Moma, dan E. Y. Awe, “Pembelajaran Inklusi sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Belajar Ramah Anak di SD Kristen Generasi Unggul,” *J. Citra Multidisiplin*, vol. 1, no. 2, hal. 130–139, Jan 2026, doi: 10.38048/jcm.v1i2.6584.
- [18] R. Melinda, A. Suriansyah, dan W. R. Refianti, “Pendidikan Inklusif: Tantangan dan Peluang dalam Implementasinya di Indonesia,” *Harmon. Pendidik. J. Ilmu Pendidik.*, vol. 2, no. 1, hal. 337–343, Des 2024, doi: 10.62383/hardik.v2i1.1096.
- [19] R. Ratnawati, “Model Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan Di Jayapura,” *Vifada J. Educ.*, vol. 3, no. 1, hal. 1–29, Jun 2025, doi: 10.70184/3kgs3665.
- [20] M. Efendi, D. H. Rahman, I. Hitipeuw, dan R. F. Pradipta, “Pelatihan Pembelajaran Kompensatoris untuk Meningkatkan Profesionalitas Guru Sekolah Inklusif,” *J. ORTOPEDAGOGIA*, vol. 7, no. 2, hal. 110, Nov 2021, doi: 10.17977/um031v7i22021p110-114.
- [21] J. Gustafsson Nyckel, E. M. Johansson, K. Lager, dan M.-H. Zimmerman Nilsson, “The travelling and embedding of discourses on quality in early childhood education and care,” *Ethnogr. Educ.*, vol. 20, no. 3, hal. 181–198, Jul 2025, doi: 10.1080/17457823.2024.2414296.